

KETAHANAN PANGAN DAN HARGA BAHAN POKOK:

Ujian Ekonomi Indonesia pada 2026



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Ketahanan Pangan dan Harga Bahan Pokok -
Ujian Ekonomi Indonesia pada 2026*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

1 April 2026

KETAHANAN PANGAN DAN HARGA BAHAN POKOK: UJIAN EKONOMI INDONESIA PADA 2026

Abstrak

Makalah ini membahas ketahanan pangan dan harga bahan pokok sebagai salah satu ujian ekonomi paling nyata bagi Indonesia pada awal 2026. Secara makro, Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi yang relatif tidak lemah: ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen, sektor pertanian tumbuh 5,33 persen, dan APBN 2026 menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Namun pada saat yang sama, dinamika harga pangan tetap menjadi sumber tekanan utama bagi rumah tangga, terutama karena volatilitas pasokan, gangguan cuaca, pola musiman Ramadan–Idulfitri, distribusi, serta keterkaitan dengan harga energi dan sentimen global. Data resmi menunjukkan bahwa inflasi tahunan Indonesia naik dari 3,55 persen pada Januari 2026 menjadi 4,76 persen pada Februari 2026, sebelum turun menjadi 3,48 persen pada Maret 2026. Pada Februari 2026, inflasi kelompok volatile food mencapai 4,64 persen secara tahunan dan terutama didorong oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Sementara itu, produksi padi menunjukkan tanda perbaikan, dengan produksi padi Februari 2026 diperkirakan mencapai 5,05 juta ton Gabah Kering Giling, naik 27,41 persen dibanding Februari 2025. Pemerintah merespons tantangan ini melalui anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp164,414 triliun, dukungan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga, penyaluran bantuan pangan,

serta penguatan pembiayaan pangan dan koordinasi TPIP-TPID. Makalah ini berargumen bahwa persoalan pangan Indonesia pada 2026 bukan semata soal kurangnya produksi, melainkan soal kemampuan sistem nasional menjaga tiga hal sekaligus: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Dengan demikian, ujian ekonomi Indonesia pada 2026 terletak pada keberhasilan mengubah pertumbuhan pertanian dan komitmen fiskal menjadi harga bahan pokok yang lebih stabil, perlindungan daya beli rumah tangga, dan ketahanan sistem pangan yang lebih tahan terhadap guncangan. (media.kemenkeu.go.id)

Kata kunci: *ketahanan pangan, harga bahan pokok, inflasi pangan, volatile food, Indonesia 2026, APBN 2026, daya beli, stabilitas ekonomi*

Ketahanan Pangan dan Harga Bahan Pokok: Ujian Ekonomi Indonesia pada 2026

Pendahuluan

Dalam banyak negara berkembang, persoalan pangan tidak pernah semata-mata menjadi urusan sektor pertanian. Ia selalu merupakan persoalan ekonomi politik, kesejahteraan rumah tangga, stabilitas sosial, dan legitimasi kebijakan publik. Indonesia pada 2026 memperlihatkan kenyataan tersebut dengan sangat jelas. Secara agregat, ekonomi nasional masih tumbuh cukup baik. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, sementara dari sisi sektoral pertanian juga tumbuh tinggi dan berkontribusi menopang aktivitas ekonomi. Akan tetapi, pada level rumah tangga, ukuran kesejahteraan yang paling cepat dirasakan bukanlah angka pertumbuhan PDB, melainkan harga beras, telur, cabai, minyak goreng, daging ayam, dan ongkos distribusi pangan sehari-hari. Karena itu, pertanyaan tentang ketahanan pangan sesungguhnya adalah pertanyaan tentang sejauh mana negara mampu menjaga agar fondasi makro yang sehat benar-benar

diterjemahkan menjadi kestabilan biaya hidup mikro.

(media.kemenkeu.go.id)

Pada awal 2026, hubungan antara pangan dan stabilitas ekonomi menjadi semakin nyata. Inflasi tahunan Indonesia tercatat 3,55 persen pada Januari 2026, melonjak menjadi 4,76 persen pada Februari 2026, lalu menurun ke 3,48 persen pada Maret 2026. Gerak ini menunjukkan dua hal. Pertama, harga-harga pada awal tahun memang bergerak dinamis. Kedua, bahkan ketika inflasi umum menurun kembali pada Maret, persoalan bahan pokok belum otomatis hilang, karena tekanan bulanan tetap ada dan ketahanan pangan tetap harus dijaga melalui pasokan, distribusi, dan ekspektasi harga. Dalam pengalaman masyarakat, penurunan angka inflasi tahunan belum tentu identik dengan hilangnya rasa cemas di pasar, sebab rumah tangga berhadapan dengan harga aktual yang dibayar setiap hari. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia menegaskan bahwa pada Februari 2026 kelompok volatile food mengalami inflasi 4,64 persen secara tahunan, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Penyebabnya berkaitan dengan meningkatnya permintaan pada periode Ramadan serta penurunan pasokan akibat gangguan cuaca. Ini menunjukkan bahwa persoalan pangan Indonesia pada 2026 tidak berdiri sendiri sebagai urusan statistik, melainkan merupakan titik temu antara kalender sosial-keagamaan, musim, iklim, logistik, dan daya beli. Dengan kata lain, ujian ekonomi Indonesia pada 2026 tampak jelas pada pertanyaan sederhana: apakah masyarakat masih dapat membeli bahan pokok dengan harga yang wajar, dalam pasokan yang cukup, di tengah gejolak permintaan dan pasokan? ([Bank Indonesia](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan mengapa ketahanan pangan dan harga bahan pokok menjadi ujian penting bagi ekonomi Indonesia pada 2026. Argumen utama makalah ini adalah bahwa ujian tersebut lahir dari pertemuan empat unsur. Pertama, pangan memiliki bobot ekonomi dan sosial yang tinggi karena berhubungan langsung dengan pengeluaran

rumah tangga. Kedua, tekanan harga pangan di Indonesia bersifat struktural sekaligus musiman. Ketiga, perbaikan produksi belum selalu otomatis berarti stabilitas harga, sebab distribusi, cadangan, pembiayaan, dan tata kelola pasar tetap menentukan. Keempat, respons kebijakan sudah cukup besar, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara menghubungkan produksi, distribusi, cadangan, dan perlindungan sosial secara serempak. Maka, ketahanan pangan pada 2026 harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan “cukup atau tidak cukup pangan”, melainkan juga sebagai persoalan “stabil atau tidak stabil harga” dan “terlindungi atau tidak terlindungi daya beli masyarakat”. (media.kemenkeu.go.id)

Ketahanan pangan sebagai konsep ekonomi dan sosial

Secara konseptual, ketahanan pangan mencakup paling tidak tiga dimensi besar: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan berkaitan dengan cukup tidaknya pasokan fisik.

Keterjangkauan berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk membeli pangan tersebut. Stabilitas berkaitan dengan apakah dua hal itu dapat bertahan dari guncangan musim, cuaca, geopolitik, inflasi, dan disrupsi distribusi. Dalam konteks Indonesia, ketiga dimensi ini saling berkaitan erat. Produksi yang meningkat tidak otomatis menenangkan pasar bila distribusi terganggu. Pasokan yang cukup di tingkat nasional juga tidak otomatis berarti harga stabil di daerah bila infrastruktur dan informasi pasar lemah. Karena itu, ketahanan pangan harus dipahami sebagai kualitas sistem, bukan hanya volume hasil panen. Argumen ini sejalan dengan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang menempatkan penguatan produksi, stabilisasi harga, penguatan lumbung dan cadangan pangan, serta penguatan rantai pasok dan distribusi sebagai arah kebijakan anggaran ketahanan pangan 2026. (media.kemenkeu.go.id)

Pemerintah sendiri secara eksplisit menempatkan pangan sebagai prioritas strategis. Newsletter APBN Kita Februari 2026 menyebut bahwa belanja negara pada APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas, dan ketahanan pangan ditempatkan sebagai agenda pertama di

antara prioritas tersebut. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menyebut bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi agenda prioritas nasional karena risiko perubahan iklim, ketidakstabilan pasar global, alih fungsi lahan, kenaikan biaya produksi, serta keterbatasan kapasitas dan permodalan dapat membuat produksi pangan kurang optimal dan harga pangan cenderung tidak stabil. Formulasi ini penting karena menunjukkan bahwa negara memandang persoalan pangan bukan sebagai isu teknis sektoral, melainkan sebagai urusan sistemik yang menyentuh kesejahteraan petani, nelayan, dan konsumen sekaligus.

Dari sudut ekonomi makro, pentingnya ketahanan pangan juga dapat dijelaskan melalui inflasi. Pangan bergejolak sering kali menjadi sumber tekanan harga yang paling terasa bagi masyarakat. Ketika harga pangan naik, dampaknya lebih cepat dan lebih luas dibanding banyak komoditas lain, karena frekuensi pembeliannya tinggi dan proporsinya besar dalam pengeluaran rumah tangga menengah bawah. Itu sebabnya Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Jadi, stabilitas pangan tidak hanya membantu indeks harga konsumen, tetapi juga menopang konsumsi rumah tangga, sentimen publik, dan legitimasi kebijakan ekonomi secara umum. ([Bank Indonesia](#))

Potret ekonomi dan pangan Indonesia pada awal 2026

Agar pembahasan lebih seimbang, perlu ditegaskan bahwa Indonesia memasuki 2026 tidak dalam keadaan ekonomi yang runtuh. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen. Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa sektor pertanian tumbuh tinggi mencapai 5,33 persen pada 2025, didukung oleh peningkatan produksi tanaman pangan dan jagung, serta subsektor peternakan yang tumbuh bersama naiknya produksi telur dan daging ayam. Selain itu, Kementerian Keuangan menilai bahwa produksi pertanian dan peternakan yang meningkat ikut membantu meredam tekanan harga. Ini berarti bahwa dari sisi fondasi produksi, ada tanda-tanda perbaikan yang cukup penting. Indonesia bukan sedang

menghadapi kegagalan total sistem pangan, melainkan menghadapi ujian untuk menerjemahkan perbaikan produksi itu menjadi harga yang lebih stabil dan lebih terjangkau. (media.kemenkeu.go.id)

Di sisi harga, perkembangan awal 2026 menunjukkan pola yang menarik. Pada Januari 2026, Kementerian Keuangan mencatat inflasi volatile food relatif rendah, dipengaruhi penurunan harga aneka cabai, daging ayam, telur, dan aneka sayuran pasca periode Natal dan Tahun Baru, serta upaya stabilisasi pasokan dan penguatan peran Bulog. Tetapi situasi itu tidak bertahan lama. Memasuki Februari 2026, BI melaporkan bahwa inflasi volatile food naik menjadi 4,64 persen secara tahunan, didorong oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah seiring kenaikan permintaan selama Ramadan serta turunnya pasokan akibat cuaca. Pola ini memperlihatkan bahwa sistem pangan Indonesia masih sensitif terhadap guncangan musiman dan iklim. Tekanan harga bisa reda sebentar, lalu kembali naik ketika permintaan meningkat dan pasokan terganggu. (media.kemenkeu.go.id)

BPS juga menunjukkan bahwa pada Maret 2026 inflasi tahunan turun menjadi 3,48 persen, sedangkan inflasi bulanan tercatat 0,41 persen. Penurunan inflasi tahunan ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa tekanan umum tidak semakin memburuk. Namun secara kebijakan, penurunan tersebut tidak boleh ditafsirkan terlalu optimistis. Jika inflasi bulanan masih positif dan bahan pokok tetap sensitif pada musim, distribusi, dan cuaca, maka kerentanan pangan tetap ada. Dengan demikian, awal 2026 memperlihatkan suatu realitas yang khas: makroekonomi tidak ambruk, tetapi kestabilan bahan pokok tetap menuntut perhatian intensif karena ia merupakan titik paling cepat di mana tekanan ekonomi dirasakan masyarakat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](https://www.bps.go.id))

Harga bahan pokok sebagai indikator kesejahteraan nyata

Dalam teori ekonomi rumah tangga, tidak semua inflasi memiliki dampak psikologis yang sama. Kenaikan harga pada barang yang jarang dibeli biasanya lebih kecil pengaruhnya terhadap persepsi kesejahteraan

dibanding kenaikan harga barang yang dibeli harian atau mingguan. Di Indonesia, bahan pokok seperti beras, cabai, ayam, telur, minyak goreng, gula, dan beberapa komoditas segar memiliki posisi yang sangat sentral. Karena frekuensi pembeliannya tinggi, perubahan harganya lebih cepat membentuk persepsi tentang “ekonomi sedang baik” atau “ekonomi sedang berat”. Karena itu, harga bahan pokok adalah indikator kesejahteraan yang jauh lebih konkret bagi masyarakat daripada banyak indikator makro lainnya. Pernyataan BI bahwa stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat pada masa HBKN sesungguhnya mencerminkan logika ini. ([Bank Indonesia](#))

Ketika harga ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah naik menjelang Ramadan, dampaknya tidak hanya tercermin pada inflasi volatile food. Ia masuk ke dapur rumah tangga, ke warung makan kecil, ke pedagang gorengan, ke UMKM kuliner, dan ke keputusan keluarga mengenai apa yang dikurangi dari daftar belanja. Di sinilah bahan pokok menjadi ujian ekonomi yang sesungguhnya. Bukan karena semua orang tiba-tiba jatuh miskin, tetapi karena ruang aman anggaran rumah tangga menjadi lebih sempit. Keluarga yang sebelumnya masih bisa menabung sedikit, atau pelaku usaha mikro yang sebelumnya masih punya margin tipis, mulai harus menyesuaikan porsi, kualitas, atau frekuensi konsumsi. Dengan demikian, harga bahan pokok bekerja sebagai penghubung langsung antara gejolak makro dan pengalaman mikro. ([Bank Indonesia](#))

Ada sisi lain yang juga penting. Harga bahan pokok yang bergejolak dapat memengaruhi ekspektasi inflasi. Bank Indonesia dalam siaran pers Maret 2026 menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan dan strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan—untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau. Artinya, ketika bahan pokok mulai naik, pemerintah dan otoritas moneter tidak hanya perlu mengurus pasokan fisik, tetapi juga persepsi masyarakat. Jika publik percaya bahwa harga akan terus naik dan pasokan akan terganggu, perilaku membeli, menimbun, atau menunda dapat

memperburuk volatilitas pasar. Karena itu, stabilisasi harga pangan adalah juga stabilisasi psikologi ekonomi. ([Bank Indonesia](#))

Mengapa tekanan harga pangan muncul kembali pada 2026?

Penjelasan pertama adalah faktor musiman. Awal 2026 bertepatan dengan periode yang sensitif, yakni perayaan Imlek, Ramadan, dan menjelang Idulfitri. BI secara eksplisit menyebut bahwa meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tersebut ikut mendorong inflasi volatile food pada Februari 2026. Dalam perekonomian Indonesia, musim keagamaan dan libur panjang bukan sekadar peristiwa budaya; ia adalah peristiwa ekonomi yang sangat riil. Permintaan terhadap daging ayam, telur, cabai, minyak goreng, makanan olahan, transportasi, dan produk pendukung lain biasanya meningkat. Jika sistem pasokan tidak cukup elastis, tekanan harga menjadi hampir tak terhindarkan. Maka, naiknya harga bahan pokok pada awal 2026 tidak dapat dibaca hanya sebagai “kegagalan pasar”, tetapi juga sebagai konsekuensi dari lonjakan permintaan yang berulang dan dapat diprediksi. ([Bank Indonesia](#))

Penjelasan kedua adalah faktor cuaca dan produksi. BI menyebut bahwa penurunan pasokan akibat gangguan cuaca ikut mendorong kenaikan harga cabai dan ayam pada Februari 2026. Nota Keuangan RAPBN 2026 juga mengidentifikasi perubahan iklim sebagai salah satu faktor yang dapat membuat produksi pangan nasional kurang optimal dan harga pangan tidak stabil. Di negara tropis kepulauan seperti Indonesia, cuaca tidak hanya memengaruhi panen, tetapi juga transportasi, mutu hasil, risiko penyakit tanaman, dan biaya distribusi. Akibatnya, ketahanan pangan nasional harus selalu diuji oleh variabel yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dalam konteks 2026, ini berarti bahwa tekanan harga pangan tidak cukup dijawab dengan wacana “meningkatkan produksi” saja; sistem pangan juga harus mampu menyerap shock cuaca dan menjaga pasokan tetap mengalir ke pasar. ([Bank Indonesia](#))

Penjelasan ketiga adalah keterkaitan antara pangan, energi, dan pembiayaan. Bank Indonesia pada 2 Maret 2026 menjelaskan bahwa

kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya transportasi dan produksi, termasuk pangan, sehingga mendorong inflasi. BI juga menegaskan bahwa gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi nilai tukar dan pada akhirnya berdampak pada harga barang impor dan stabilitas harga dalam negeri. Ini berarti bahwa ketahanan pangan Indonesia pada 2026 tidak hanya diuji dari sawah, kandang, dan pasar tradisional, tetapi juga dari harga minyak, kurs, dan volatilitas global. Begitu ongkos logistik, pupuk, pakan, atau input tertentu naik, harga bahan pokok ikut menghadapi tekanan. Karena itu, pangan harus dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas, bukan sektor yang berdiri sendiri. ([Bank Indonesia](#))

Penjelasan keempat adalah struktur distribusi. Pemerintah sendiri menempatkan penguatan rantai pasok dan distribusi efektif sebagai salah satu arah kebijakan anggaran ketahanan pangan 2026. Arah kebijakan ini memberi petunjuk bahwa masalah pangan Indonesia tidak berhenti pada volume produksi. Sering kali produksi nasional mencukupi, tetapi distribusi antardaerah tidak lancar, cadangan tidak segera masuk pasar, atau informasi harga tidak bergerak cukup cepat. Di sinilah terlihat bahwa kenaikan harga bahan pokok bisa terjadi walaupun panen sedang membaik, bila rantai pasok belum cukup responsif. Maka, ujian ekonomi Indonesia pada 2026 juga merupakan ujian tata kelola distribusi. ([media.kemenkeu.go.id](#))

Sisi terang: produksi mulai membaik

Walaupun tekanan harga nyata, ada alasan penting untuk tidak membaca situasi pangan 2026 secara pesimistis. BPS merilis bahwa luas panen padi Februari 2026 mencapai 0,94 juta hektare, naik 23,62 persen dibanding Februari 2025, sedangkan produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling diperkirakan mencapai 5,05 juta ton, naik 27,41 persen dibanding Februari 2025. Bahkan pada Januari 2026, produksi padi diperkirakan sebesar 3,04 juta ton GKG. Data ini menandakan bahwa sisi produksi padi memasuki 2026 dengan kecenderungan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Dalam analisis ketahanan pangan, hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak semata-mata menghadapi penurunan output, melainkan sedang berusaha menutup kesenjangan antara produksi yang membaik dan stabilitas harga yang belum sepenuhnya mapan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perbaikan ini konsisten dengan narasi kebijakan yang lebih luas. Nota Keuangan RAPBN 2026 menyebut bahwa produktivitas padi meningkat dari 52,26 ku/ha pada 2021 menjadi 52,90 ku/ha pada 2024, dan produksi daging ayam ras pedaging juga meningkat dari 3,19 juta ton pada 2021 menjadi 3,84 juta ton pada 2024. Dokumen yang sama mencatat bahwa anggaran ketahanan pangan 2021–2024 tumbuh rata-rata 22,9 persen, lalu setelah sedikit turun pada outlook 2025, direncanakan kembali tumbuh 5,9 persen pada 2026. Dengan kata lain, pemerintah sedang berusaha membangun fondasi produksi dan infrastruktur pangan secara lebih serius. Namun, fondasi jangka menengah yang membaik tidak otomatis menghapus tekanan harga jangka pendek. Di situlah letak tantangan 2026: bagaimana menjembatani keberhasilan struktural dengan kenyamanan harga harian. (media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa sektor pertanian tumbuh 5,33 persen pada 2025 dan bahwa peningkatan produksi pertanian serta peternakan ikut meredam tekanan harga. Informasi ini memberi gambaran bahwa negara tidak sedang pasif. Terdapat perbaikan nyata dalam sisi supply. Akan tetapi, pertumbuhan sektor pertanian belum cukup bila transmisi hasilnya ke pasar ritel tidak berjalan mulus. Seorang konsumen kota tidak merasakan pertumbuhan sektor pertanian secara langsung; ia merasakannya ketika harga beras, ayam, telur, dan cabai menjadi lebih stabil. Maka, perbaikan produksi adalah prasyarat penting, tetapi stabilitas harga tetap bergantung pada tahapan berikutnya: serapan, cadangan, distribusi, pembiayaan, dan pengawasan pasar. (media.kemenkeu.go.id)

Ketahanan pangan sebagai ujian APBN 2026

APBN 2026 menempatkan pangan dalam posisi yang sangat penting. Newsletter APBN Kita Februari 2026 menegaskan bahwa belanja negara diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas dan ketahanan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama. Nota Keuangan RAPBN 2026 kemudian memperjelas hal ini dengan menyatakan bahwa anggaran ketahanan pangan tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164,414 triliun. Dokumen yang sama menyebut tiga arah kebijakan utama: mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan lumbung dan cadangan serta rantai pasok yang efektif, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan melalui bantuan sarana-prasarana, akses permodalan, dan perlindungan usaha. Secara konseptual, desain ini sudah cukup komprehensif, karena menghubungkan produksi, harga, dan kesejahteraan produsen pangan.

Lebih rinci lagi, Nota Keuangan menjelaskan bahwa melalui belanja K/L, alokasi ketahanan pangan pada RAPBN 2026 direncanakan Rp67,0563 triliun, sedangkan melalui belanja non-K/L Rp55,7158 triliun. Selain itu, ketahanan pangan juga didukung oleh transfer ke daerah sebesar Rp12,3584 triliun dan dukungan pembiayaan Rp29,2835 triliun. Di sisi pembiayaan, pemerintah merencanakan investasi kepada Perum Bulog sebesar Rp22,734 triliun untuk menyerap produksi beras atau gabah petani dalam negeri, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengendalikan stabilitas harga di tingkat konsumen. Ini merupakan pesan kebijakan yang penting: APBN 2026 tidak memandang pangan hanya sebagai urusan produksi di lahan, tetapi juga sebagai urusan cadangan, serapan, dan stabilisasi harga pasar. (media.kemenkeu.go.id)

Jika dibaca lebih jauh, target output strategis ketahanan pangan 2026 juga mencerminkan upaya yang luas. Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan padi 2.127.000 hektare, cetak sawah 250.000 hektare, optimasi lahan pertanian 300.000 hektare, penyaluran pupuk bersubsidi 9,62 juta ton, serta penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. Walaupun terdapat kemungkinan kekeliruan pengetikan pada sebagian angka penerima dalam

hasil parsing, arah kebijakan dasarnya sangat jelas: negara berupaya membangun ketahanan pangan dari hulu sampai hilir. Hal ini menunjukkan bahwa pangan pada 2026 memang menjadi ujian ekonomi, tetapi juga menjadi ladang pembuktian bagi kapasitas fiskal negara. Seberapa efektif anggaran ini bekerja akan sangat menentukan apakah harga bahan pokok bisa lebih tenang atau tetap bergejolak. (media.kemenkeu.go.id)

Perlindungan daya beli melalui bantuan pangan dan stabilisasi pasar

Salah satu alasan mengapa pangan menjadi isu makroekonomi adalah karena ketika harga bahan pokok naik, negara hampir selalu harus ikut campur untuk melindungi daya beli. APBN Kita Februari 2026 menunjukkan hal itu secara nyata. Pemerintah menyiapkan stimulus fiskal Ramadan–Idulfitri 2026, dan di sisi perlindungan sosial pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat untuk dua bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret 2026. Di luar itu, penyaluran PKH, PBI JKN, dan berbagai bantuan lain dipercepat sejak awal tahun. Kebijakan ini memberi pesan bahwa negara menyadari tekanan pangan tidak bisa ditangani hanya dengan wacana produksi jangka menengah; perlindungan jangka pendek terhadap rumah tangga rentan juga harus berjalan.

Program perlindungan tersebut juga berfungsi sebagai penyangga makro. Ketika harga pangan naik, konsumsi rumah tangga miskin dan menengah bawah adalah komponen yang paling cepat tertekan. Bantuan pangan, subsidi pupuk, serapan Bulog, dan operasi pasar murah membantu mencegah guncangan itu berubah menjadi penurunan konsumsi yang lebih dalam. Itulah sebabnya BI pada 2 Maret 2026 menekankan perlunya koordinasi dari hulu hingga hilir, termasuk melalui operasi pasar murah, hilirisasi pangan, kerja sama daerah, dan strategi 4K. Dalam konteks ini, perlindungan sosial dan stabilisasi pangan bukan dua kebijakan terpisah, melainkan dua sisi dari agenda menjaga daya beli dan stabilitas permintaan domestik. ([Bank Indonesia](https://www.bankindonesia.co.id))

Peran pembiayaan pangan dan koordinasi kebijakan

Di Indonesia, masalah pangan juga sering kali bersentuhan dengan masalah pembiayaan. Produsen kecil, pedagang, peternak, dan distributor menghadapi persoalan modal kerja, ketidakpastian permintaan, dan risiko harga. Karena itu, ketahanan pangan yang kuat memerlukan pembiayaan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga tepat sasaran. Dalam siaran pers 2 Maret 2026, Bank Indonesia menyatakan bahwa menjelang Idulfitri BI memperkuat pengendalian inflasi melalui dukungan penyaluran kredit pangan untuk menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan. BI juga menjelaskan bahwa penguatan pengendalian inflasi dilakukan melalui tujuh program unggulan dan difokuskan pada strategi 4K. Ini berarti sistem pangan tidak hanya perlu pasokan dan logistik, tetapi juga kredit yang cukup agar produksi dan distribusi mampu menjawab lonjakan permintaan. ([Bank Indonesia](#))

BI dalam siaran pers yang sama juga menyebut bahwa dalam ketidakpastian global yang tinggi terdapat tiga jalur utama yang memengaruhi perekonomian domestik: kenaikan harga minyak yang meningkatkan biaya transportasi dan produksi termasuk pangan, gejolak pasar keuangan yang memengaruhi nilai tukar dan harga barang impor, serta perlambatan perdagangan global yang menekan pertumbuhan. Analisis ini sangat penting karena mengingatkan bahwa stabilitas pangan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari stabilitas makro. Ketika minyak, kurs, dan sentimen global berubah, biaya pangan ikut menghadapi tekanan. Oleh karena itu, koordinasi BI dengan pemerintah, TPIP, TPID, Bapanas, dan berbagai pelaku pasar menjadi unsur yang sangat menentukan. Ketahanan pangan pada 2026 adalah hasil dari koordinasi lintas kebijakan, bukan semata hasil panen. ([Bank Indonesia](#))

Kasus naratif: bagaimana tekanan pangan dirasakan rumah tangga

Bayangkan sebuah keluarga di kota menengah di Jawa atau Sumatra pada awal 2026. Kepala keluarga bekerja di sektor formal dengan penghasilan yang relatif tetap. Pasangan membantu pendapatan keluarga melalui usaha makanan rumahan atau penjualan kecil-kecilan. Ketika harga cabai, ayam,

dan minyak goreng naik menjelang Ramadan, biaya belanja rumah tangga naik, sementara biaya produksi usaha kecil mereka juga ikut meningkat. Mereka masih membeli pangan, tetapi mulai mengurangi kualitas lauk, menunda pembelian barang lain, atau mengurangi tabungan darurat yang seharusnya disimpan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan. Dalam statistik nasional, keluarga ini mungkin tidak tampak sebagai “krisis”. Namun dalam pengalaman hidup, tekanan itu nyata.

Narasi serupa juga berlaku bagi petani dan produsen kecil. Ketika panen membaik, mereka belum tentu langsung merasakan manfaat penuh bila harga di tingkat produsen belum cukup baik, biaya pupuk dan logistik masih tinggi, atau serapan pasar tidak berjalan lancar. Karena itu, ketahanan pangan tidak boleh dibaca hanya dari sudut konsumen atau produsen saja. Ia harus dilihat sebagai keseimbangan yang adil antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi produsen. Di sinilah peran cadangan pangan, serapan Bulog, subsidi pupuk, dan pembiayaan pangan menjadi sangat penting: menjembatani dua kepentingan yang sama-sama sah dalam sistem pangan nasional.

Ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi nasional

Mengapa persoalan bahan pokok disebut sebagai ujian ekonomi Indonesia pada 2026? Jawabannya karena pangan merupakan titik tempat ketahanan makro diuji oleh kenyataan mikro. Sebuah negara dapat memiliki pertumbuhan yang baik, sektor pertanian yang pulih, dan anggaran yang besar; tetapi bila harga bahan pokok tetap bergejolak, masyarakat akan menilai bahwa kesejahteraan belum benar-benar aman. Bahan pokok menjadi barometer yang amat sensitif bagi kepercayaan sosial terhadap ekonomi. Itulah mengapa Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN menjaga stabilitas dan memperkuat perlindungan masyarakat, sedangkan BI menekankan bahwa stabilitas harga pangan adalah kunci daya beli. Dua institusi ini pada dasarnya sedang berbicara tentang hal yang sama: pangan adalah pintu masuk utama antara stabilitas makro dan pengalaman sosial.

Di sisi lain, persoalan pangan juga menentukan kualitas pertumbuhan. Jika harga bahan pokok terlalu bergejolak, rumah tangga menekan konsumsi lain, UMKM kuliner kehilangan margin, dan kebijakan moneter harus bekerja lebih keras menjaga inflasi. Sebaliknya, bila pasokan cukup dan harga stabil, daya beli lebih terjaga, ekspektasi lebih tenang, dan kebijakan fiskal tidak perlu terlalu sering masuk sebagai pemadam kebakaran. Karena itu, ketahanan pangan yang baik sesungguhnya merupakan syarat bagi pertumbuhan yang lebih berkualitas. Ia membuat ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga lebih tenang dan lebih merata dampaknya.

Agenda perbaikan ke depan

Pelajaran pertama dari 2026 adalah bahwa produksi harus terus ditingkatkan, tetapi produksi saja tidak cukup. Data BPS tentang kenaikan luas panen dan produksi padi Februari 2026 memberikan alasan untuk optimis. Namun stabilitas harga tetap menuntut perbaikan distribusi, penyimpanan, cadangan, dan informasi pasar. Karena itu, agenda ketahanan pangan Indonesia perlu menempatkan logistik dan rantai pasok setara pentingnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Tanpa itu, setiap musim panen yang baik bisa tetap gagal diterjemahkan menjadi harga yang stabil di pasar konsumen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pelajaran kedua adalah bahwa cadangan pangan dan serapan pemerintah harus berfungsi lebih adaptif. Nota Keuangan RAPBN 2026 menempatkan penguatan lumbung pangan, cadangan pangan, dan peran Bulog sebagai bagian inti strategi stabilisasi. Ini perlu dijalankan secara disiplin agar fluktuasi musiman tidak langsung diteruskan ke harga ritel. Jika cadangan hanya menjadi angka dalam dokumen, maka gejolak harga tetap akan muncul berulang. Sebaliknya, bila cadangan pangan dikelola aktif, pasar mendapatkan sinyal bahwa negara mampu masuk ketika pasokan terganggu atau harga melonjak terlalu cepat. (media.kemenkeu.go.id)

Pelajaran ketiga adalah perlunya pembiayaan pangan yang lebih kuat dan tepat. BI telah menegaskan pentingnya kredit pangan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idulfitri. Arah ini perlu diperdalam, karena

petani, peternak, distributor, dan UMKM pangan memerlukan modal kerja yang fleksibel agar bisa merespons perubahan permintaan dan mengelola risiko pasokan. Ketahanan pangan yang kuat bukan hanya hasil dari lahan yang subur, tetapi juga hasil dari sistem pembiayaan yang memungkinkan pelaku rantai pasok bergerak tepat waktu. ([Bank Indonesia](#))

Pelajaran keempat adalah bahwa stabilitas pangan membutuhkan sinergi yang konsisten, bukan reaksi sesaat. TIAP tahun Indonesia memasuki periode-periode sensitif seperti Ramadan, Idulfitri, musim hujan, atau fluktuasi harga komoditas global. Karena itu, strategi pengendalian inflasi pangan tidak boleh hanya aktif saat harga sudah naik. Ia harus bekerja sebagai sistem antisipasi: memetakan komoditas rawan, mengarahkan pembiayaan, mengelola cadangan, menghubungkan daerah surplus dan defisit, serta menjaga komunikasi pasar. Strategi 4K yang ditegaskan BI—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan—memberi kerangka yang tepat untuk itu. ([Bank Indonesia](#))

Penutup

Makalah ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan harga bahan pokok memang menjadi salah satu ujian ekonomi Indonesia pada 2026. Ujian itu muncul bukan karena ekonomi nasional sedang runtuh, melainkan karena justru di tengah pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen, dan komitmen fiskal yang besar, masyarakat tetap menilai kesehatan ekonomi melalui harga bahan pokok yang mereka hadapi sehari-hari. Inflasi volatile food yang melonjak pada Februari 2026, kenaikan harga ayam dan cabai, tekanan musiman Ramadan, serta gangguan cuaca memperlihatkan bahwa sistem pangan Indonesia masih sensitif terhadap guncangan jangka pendek. (media.kemenkeu.go.id)

Namun, makalah ini juga menunjukkan sisi yang lebih konstruktif. Produksi padi pada Februari 2026 meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, APBN 2026 menyediakan anggaran ketahanan pangan yang besar, pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan memperkuat stabilisasi

harga, sementara BI dan pemerintah memperdalam koordinasi pengendalian inflasi dan pembiayaan pangan. Fakta-fakta ini menandakan bahwa Indonesia tidak sedang diam di hadapan masalah; justru sedang berusaha memperkuat fondasi sistem pangannya. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa perbaikan produksi, besarnya anggaran, dan kuatnya koordinasi benar-benar berujung pada harga yang lebih tenang dan daya beli yang lebih terlindungi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, ketahanan pangan pada 2026 harus dipahami sebagai ujian atas kapasitas negara mengintegrasikan hulu, tengah, dan hilir sistem pangan. Indonesia memerlukan sawah yang produktif, peternakan yang efisien, gudang dan cadangan yang aktif, distribusi yang lancar, pembiayaan yang cukup, dan perlindungan sosial yang cepat. Jika seluruh mata rantai ini bekerja serempak, maka harga bahan pokok tidak hanya akan lebih stabil, tetapi juga pertumbuhan ekonomi akan terasa lebih nyata di meja makan rumah tangga Indonesia. Di titik itulah ketahanan pangan tidak lagi sekadar slogan pembangunan, melainkan menjadi ukuran keberhasilan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Glosarium

Ketahanan pangan

Kondisi ketika pangan tersedia dalam jumlah cukup, dapat dijangkau oleh

masyarakat, dan stabil dari waktu ke waktu meskipun menghadapi guncangan.

Bahan pokok

Komoditas pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, cabai, dan komoditas sejenis.

Volatile food

Kelompok komoditas pangan yang harganya mudah berfluktuasi karena sangat dipengaruhi musim, cuaca, pasokan, dan distribusi.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Stok pangan yang dikelola pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan membantu stabilisasi harga ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga.

GKG (Gabah Kering Giling)

Gabah dengan kadar air tertentu yang siap digiling menjadi beras; sering dipakai sebagai ukuran produksi padi.

TPIP dan TPID

Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yaitu forum koordinasi untuk pengendalian inflasi, termasuk inflasi pangan.

Strategi 4K

Pendekatan pengendalian inflasi yang menekankan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu instrumen fiskal utama pemerintah pusat.

Bulog

Badan usaha milik negara yang berperan penting dalam pengelolaan stok beras, serapan gabah, dan stabilisasi pangan tertentu.

Daya beli

Kemampuan rumah tangga membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang dimilikinya.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026d). *Luas panen padi pada Februari 2026 sebesar 0,94 juta hektare dengan produksi padi diperkirakan sebanyak 5,05 juta ton gabah kering giling (GKG)*. Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2026a). *Inflasi IHK Februari 2026 tetap terkendali*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026b). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026c). *Optimalkan kredit pangan, Bank Indonesia jaga stabilitas harga jelang Idulfitri*. Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). *APBN Kita: Publikasi kinerja dan fakta, Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). *Newsletter APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>